

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

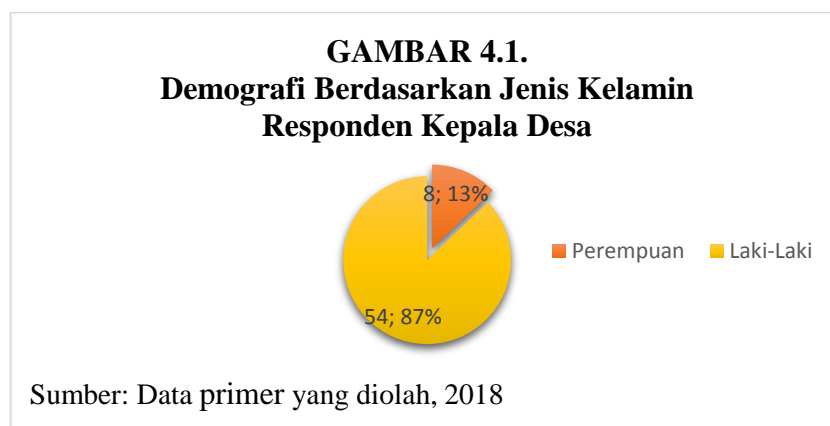
A. Gambaran Umum Objek/Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dengan responden kepala desa dan kaur keuangan. Pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan *Random Sampling* dengan cara mengalikan jumlah desa perkecamatan dengan dua per 11. Dengan demikian diperoleh sebanyak 84 sampel dengan jumlah responden sebanyak 168. Alat penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan jumlah 45 item pernyataan, yang masing-masing 16 pernyataan untuk Pengendalian Internal (X1), 17 pernyataan untuk *Good Government Governance* (X2) dan 12 pernyataan untuk Pencegahan Kecurangan (Y).

Setelah data terkumpul, diperoleh sampel yang dapat digunakan sebanyak 62 sampel desa. Adapun alasan mengapa sampel tidak dapat digunakan yaitu karena 18 sampel tidak mengisi seluruh item pertanyaan dan empat sampel tidak mengembalikan kuesioner dikarenakan hilang. Berikut ini akan disajikan statistik deskriptif berdasarkan jawaban dari responden yang terdiri atas demografi responden seperti jenis kelamin, usia, lama bekerja dan tingkat pendidikan.

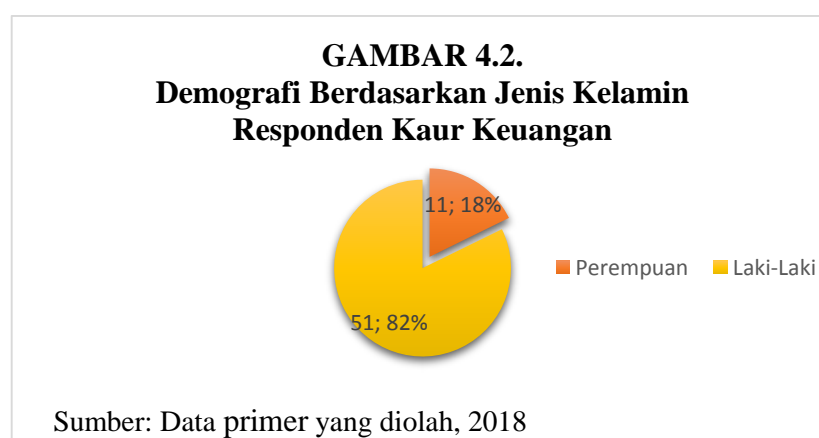
1. Demografi Berdasarkan Jenis Kelamin.

Berikut adalah diagram responden kepala desa berdasarkan jenis kelamin:



Berdasarkan Gambar 4.1. dapat dilihat bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak di bandingkan perempuan yaitu masing-masing sebesar 54 atau 87% merupakan responden laki-laki dan 8 atau 13% merupakan responden perempuan.

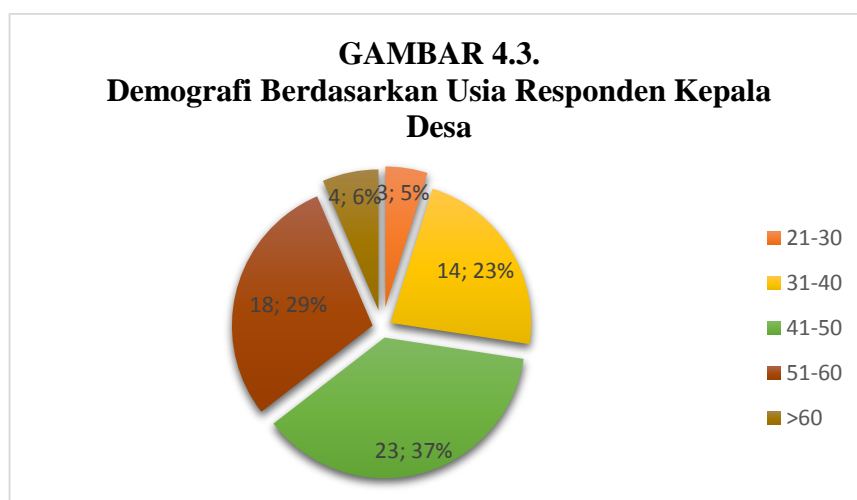
Responden yang kedua adalah kaur keuangan, berikut diagram responden kaur keuangan Kantor Kepala Desa yang ada di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah:



Berdasarkan Gambar 4.2. jumlah responden kaur keuangan di Kantor Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah masing-masing sebesar 11 atau 18% perempuan dan 51 atau 82% merupakan responden laki-laki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden baik kepala desa maupun kaur keuangan adalah laki-laki.

2. Demografi Berdasarkan Usia.

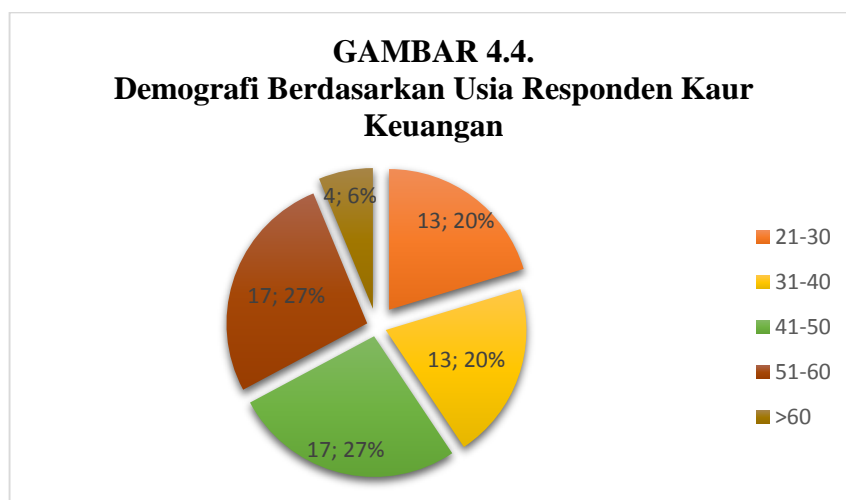
Berikut adalah diagram responden kepala desa berdasarkan usia di Kantor Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah:



Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan data dari kuesioner yang kembali diperoleh hasil 3 atau 5% responden berusia antara 21-30 tahun, 14 atau 23% responden berusia 31-40 tahun, 23 atau 39% berusia antara 41-50 tahun, 18 atau 28% berusia antara 51-60 tahun dan 4 atau 5% sisanya berusia di atas 60 tahun.

Responden yang kedua adalah kaur keuangan. Berikut adalah diagram responden kaur keuangan yang berada di Kantor Pemerintah Desa, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah:



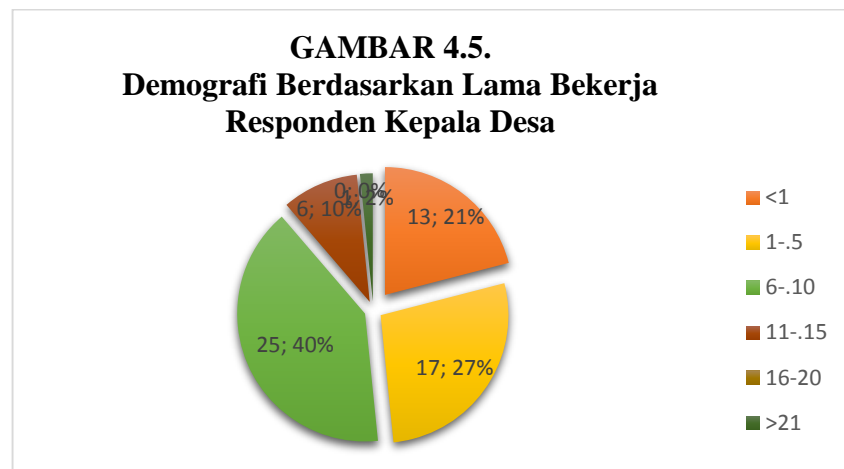
Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan Gambar 4.4. dapat dilihat bahwa responden yang berusia 21-30 tahun sebanyak 13 atau 20 %, responden usia 31-40 sebanyak 13 atau 20%, responden usia 41-50 sebanyak 17 atau 27%, responden usia 51-60 tahun sebanyak 17 atau 27% dan responden di atas 60 tahun sebanyak 4 atau 6% dari jumlah seluruh responden.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data tersebut sebagian besar responden pada penelitian ini berusia 41-50 tahun.

3. Demografi Berdasarkan Lama Bekerja.

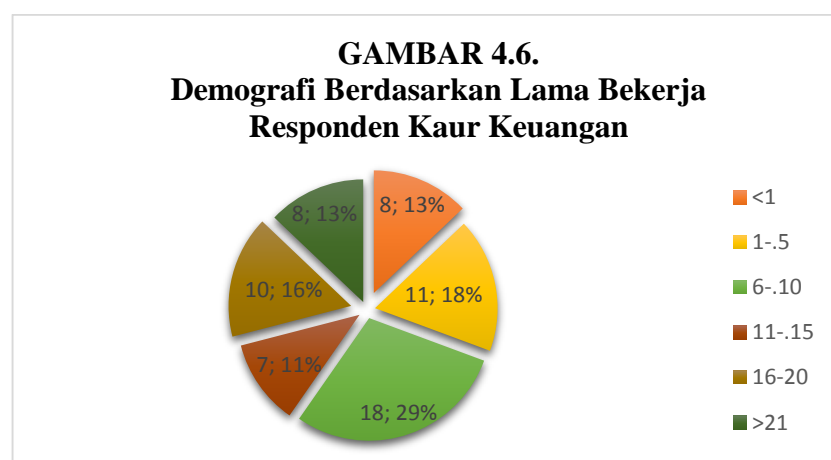
Berikut adalah diagram responden kepala desa berdasarkan lama bekerja di Kantor Pemerintahan Desa, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah:



Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan Gambar 4.5. dapat dilihat bahwa terdapat 13 atau 21% responden yang bekerja kurang dari 1 tahun, 17 atau 27% untuk responden yang telah bekerja selama 1-5 tahun, 25 atau 40% untuk responden yang telah bekerja selama 6-10 tahun, 6 atau 10% untuk responden yang telah bekerja selama 11-15 tahun dan 1 atau 2% untuk responden yang bekerja diatas 21 tahun.

Responden kedua adalah kaur keuangan. Berikut diagram berdasarkan lama bekerja untuk responden kaur keuangan di Kantor Kepala Desa, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah:



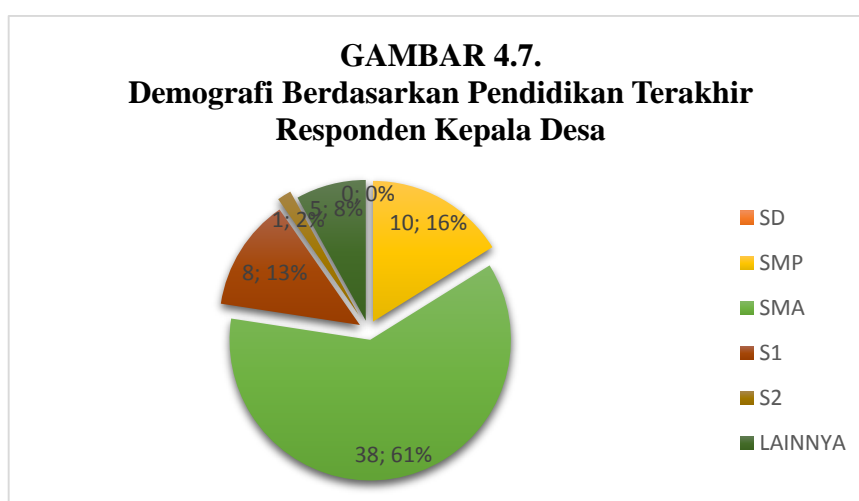
Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan Gambar 4.6. dapat dilihat bahwa terdapat 8 atau 13% responden yang bekerja kurang dari 1 tahun, 11 atau 18% untuk responden yang telah bekerja selama 1-5 tahun, 18 atau 29% untuk responden yang telah bekerja selama 6-10 tahun, 7 atau 11% untuk responden yang telah bekerja selama 11-15 tahun, 10 atau 16% untuk responden yang bekerja 16-20 tahun dan 8 atau 13% untuk responden yang bekerja diatas 21 tahun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik responden kepala desa maupun responden kaur keuangan sebagian besar merupakan pegawai yang telah bekerja selama 6-10 tahun.

4. Demografi Berdasarkan Pendidikan Terakhir.

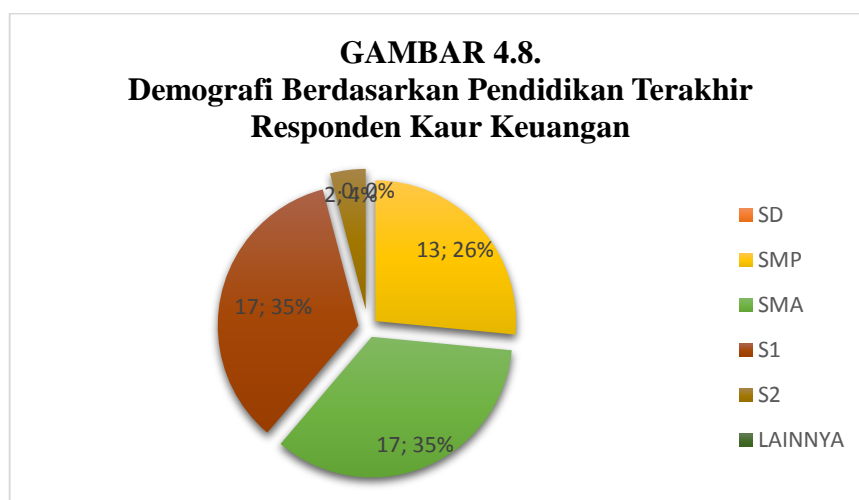
Berikut adalah diagram responden berdasarkan pendidikan responden kepala desa yang ada di Kantor Pemerintahan Desa, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah:



Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa untuk tingkat pendidikan terakhir responden kepala desa sebanyak 10 atau 16% responden mempunyai tingkat pendidikan terakhir SMP, 38 atau 61% responden mempunyai tingkat pendidikan terakhir SMA, 8 atau 13% responden mempunyai tingkat pendidikan terakhir S1, 1 atau 2% responden mempunyai tingkat pendidikan terakhir S2 dan 5 atau 8% responden mempunyai tingkat pendidikan terakhir selain SD,SMP, SMA, S1 dan S2 yaitu D1, D2 dan D3.

Responden kedua adalah kaur keuangan. Berikut diagram berdasarkan pendidikan terakhir untuk responden kaur keuangan di Kantor Kepala Desa, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah:



Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa untuk tingkat pendidikan terakhir responden kepala desa sebanyak 13 atau 26% responden mempunyai tingkat pendidikan terakhir SMP, 17 atau 35% responden mempunyai tingkat pendidikan terakhir SMA, 17 atau 35%

responden mempunyai tingkat pendidikan terakhir S1 dan 2 atau 4% responden mempunyai tingkat pendidikan terakhir S2.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk responden kepala desa sebagian besar mempunyai tingkat pendidikan terakhir SMA, namun untuk responden kaur keuangan mayoritas mempunyai tingkat pendidikan terakhir SMA dan S1.

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Analisis Statistik Deskriptif.

Setelah data diperoleh langkah selanjutnya adalah melakukan analisis statistik deskriptif guna melihat gambaran tentang kondisi variabel-variabel pada penelitian yang dilakukan. Analisis statistik deskriptif ini mencakup sampel sebanyak 62 kisaran teoritis, kisaran sampel, *mean* dan median. Berikut hasil Analisis Statistik Deskriptif yang di rangkum pada tabel 4.1.:

Tabel 4.1.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Kisaran Teoritis	Kisaran Sampel	Mean	Median
PENGENDALIAN INTERNAL	16-80	48,00-73,50	61,83	48
GCG	17-85	62,00-84,00	70,71	51
TINDAK PENCEGAHAN KECURANGAN	12-60	43,00-57,00	48,39	36

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Kisaran teoritis merupakan kisaran yang menjelaskan tentang kisaran yang seharusnya terjadi yaitu nilai minimum seharusnya dengan nilai maksimum seharusnya, sedangkan kisaran sampel merupakan kisaran skor minimal dan maksimal dari hasil pengisian kuesioner oleh responden.

Berdasarkan *mean* pada hasil analisis statistika deskriptif dapat disimpulkan bahwa untuk variabel independen pengendalian internal memperoleh *mean* sebesar 61,83 dimana lebih besar dari nilai median sebesar 48 sehingga menandakan bahwa pengendalian internal pada Kantor Pemerintahan Desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah telah diterapkan. Selanjutnya, untuk variabel independen kedua yaitu *good government governance* memperoleh *mean* sebesar 70,71 dimana lebih besar dari nilai median sebesar 51 yang menandakan bahwa *good government governance* pada Kantor Pemerintahan Desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah telah diterapkan. Variabel dependen tindak pencegahan kecurangan memperoleh nilai *mean* sebesar 48,39 dimana lebih besar dari nilai median sebesar 36 sehingga menandakan bahwa tindak pencegahan kecurangan pada Kantor Pemerintahan Desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah telah diterapkan.

2. Uji Validitas.

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel

(Sunjoyo *et.al.*, 2013). Menurut Sugiyono (2004) dalam buku Analisis Statistika dengan SPSS (2017) menyatakan bahwa apabila instrumen valid berarti alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang diukur. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Corrected Item-Total Correlation* dan membandingkan nilai tersebut sebagai r hitung dengan r tabel. Pada penelitian ini, jumlah data yang digunakan adalah 62. Untuk $N = 62$, maka df tabel atau r tabel adalah 0,211. Jika nilai r hitung $\geq r$ tabel maka item pernyataan dinyatakan valid, sebaliknya jika r hitung $< r$ tabel maka item pernyataan tersebut tidak valid dan tidak disertakan dalam analisis data selanjutnya. Adapun hasil dari uji validitas dari masing-masing instrumen disajikan pada tabel 4.2.:

Tabel 4.2.
Hasil Uji Validitas

Pengendalian Internal (X1)				
Indikator	No. Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	1	0,613	0,211	Valid
	2	0,151	0,211	Tidak Valid
	3	0,417	0,211	Valid
	4	0,500	0,211	Valid
Penilaian Resiko	5	0,646	0,211	Valid
	6	0,661	0,211	Valid
	7	0,543	0,211	Valid
	8	0,441	0,211	Valid
Sistem Informasi	9	0,465	0,211	Valid
	10	0,472	0,211	Valid
	11	0,559	0,211	Valid
Kegiatan Pengendalian	12	0,549	0,211	Valid
	13	0,465	0,211	Valid
	14	0,581	0,211	Valid
	15	0,624	0,211	Valid
Pemantauan	16	0,488	0,211	Valid

Lanjutan Tabel 4.2.

Good Government Governance (GGG) (X2)				
Kepastian Hukum	1	0,457	0,211	Valid
	2	0,444	0,211	Valid
Tertib Penyelenggaraan Negara	3	0,580	0,211	Valid
	4	0,528	0,211	Valid
Kepentingan Umum	5	0,549	0,211	Valid
	6	0,435	0,211	Valid
Keterbukaan	7	0,673	0,211	Valid
	8	0,482	0,211	Valid
Proporsionalitas	9	0,581	0,211	Valid
	10	0,224	0,211	Valid
Profesionalitas	11	0,610	0,211	Valid
	12	0,601	0,211	Valid
Akuntabilitas	13	0,550	0,211	Valid
	14	0,552	0,211	Valid
Efektifitas dan Efisiensi	15	0,587	0,211	Valid
	16	0,745	0,211	Valid
	17	0,697	0,211	Valid
Tindak Pencegahan Kecurangan (Y)				
<i>Setting Tone at The Top</i>	1	0,593	0,211	Valid
	2	0,564	0,211	Valid
Perekrutan Pegawai	3	0,422	0,211	Valid
	4	0,290	0,211	Valid
Pelatihan	5	0,327	0,211	Valid
	6	0,427	0,211	Valid
Mengidentifikasi dan Mengukur Resiko Kecurangan	7	0,468	0,211	Valid
	8	0,363	0,211	Valid
Pengurangan Resiko Kecurangan	9	0,572	0,211	Valid
	10	0,492	0,211	Valid
Memantau Program dan Pengendalian Pencegahan Kecurangan	11	0,554	0,211	Valid
	12	0,650	0,211	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan data yang ada di tabel 4.2. dapat dilihat bahwa terdapat satu item pernyataan yang tidak valid yaitu item pernyataan pada no dua dimana nilai r hitung lebih kecil dari r tabel sehingga dapat

dikatakan bahwa item pernyataan no dua tidak dapat mengukur variabel X1 yaitu pengendalian internal. Dengan demikian item pernyataan no dua akan dihapus dan tidak disertakan dalam uji analisis selanjutnya. Sedangkan untuk item pernyataan lainnya r tabel lebih besar dari r hitung sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut dapat mengukur variabel pengendalian internal (X1), *Good Government Governance* (X2), dan tindak pencegahan kecurangan (Y). Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka diperlukan melakukan uji validitas kedua dengan cara menghilangkan item pernyataan yang tidak valid yaitu item pernyataan no dua. Berikut tabel hasil uji validitas kedua:

Tabel 4.3.
Hasil Uji Validitas Kedua
Pengendalian Internal (X1)

Indikator	No. Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	1	0,613	0,211	Valid
	2	0,416	0,211	Valid
	3	0,512	0,211	Valid
Penilaian Resiko	4	0,657	0,211	Valid
	5	0,679	0,211	Valid
	6	0,549	0,211	Valid
	7	0,454	0,211	Valid
Sistem Informasi	8	0,468	0,211	Valid
	9	0,464	0,211	Valid
	10	0,565	0,211	Valid
Kegiatan Pengendalian	11	0,556	0,211	Valid
	12	0,465	0,211	Valid
	13	0,575	0,211	Valid
	14	0,625	0,211	Valid
Pemantauan	15	0,481	0,211	Valid
<i>Good Government Governance (GGG) (X2)</i>				
Kepastian Hukum	1	0,457	0,211	Valid
	2	0,444	0,211	Valid

Lanjutan Tabel 4.3.

Tertib Penyelenggaraan Negara	3	0,580	0,211	Valid
	4	0,528	0,211	Valid
Kepentingan Umum	5	0,549	0,211	Valid
	6	0,435	0,211	Valid
Keterbukaan	7	0,673	0,211	Valid
	8	0,482	0,211	Valid
Proporsionalitas	9	0,581	0,211	Valid
	10	0,224	0,211	Valid
Profesionalitas	11	0,610	0,211	Valid
	12	0,601	0,211	Valid
Akuntabilitas	13	0,550	0,211	Valid
	14	0,552	0,211	Valid
Efektifitas dan Efisiensi	15	0,587	0,211	Valid
	16	0,745	0,211	Valid
	17	0,697	0,211	Valid
Tindak Pencegahan Kecurangan (Y)				
<i>Setting Tone at The Top</i>	1	0,593	0,211	Valid
	2	0,564	0,211	Valid
Perekrutan Pegawai	3	0,422	0,211	Valid
	4	0,290	0,211	Valid
Pelatihan	5	0,327	0,211	Valid
	6	0,427	0,211	Valid
Mengidentifikasi dan Mengukur Resiko Kecurangan	7	0,468	0,211	Valid
	8	0,363	0,211	Valid
Pengurangan Resiko Kecurangan	9	0,572	0,211	Valid
	10	0,492	0,211	Valid
Memantau Program dan Pengendalian Pencegahan Kecurangan	11	0,554	0,211	Valid
	12	0,650	0,211	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan data yang ada di tabel 4.3. untuk uji validitas kedua dapat dilihat bahwa tidak ada item pernyataan yang tidak valid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk uji validitas kedua semua item pernyataan dinyatakan valid dan untuk pengujian selanjutnya item pernyataan no dua dihapus.

3. Uji Reliabilitas.

Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Sunjoyo *et al*, 2013). Uji reliabilitas juga digunakan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan akan menghasilkan data yang konsisten atau tidak meskipun digunakan lebih dari satu kali. Menurut Sugiyono (2004) dalam Analisis Statistik dengan SPSS (2017) menjelaskan bahwa penelitian yang *reliable* adalah ketika terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan SPSS dengan cara melakukan uji statistic *Cronbach Alpha*. Menurut Nazaruddin dan Basuki (2017) nilai koefisien reliabilitas yang baik adalah diatas 0,7. Nilai koefisien reliabilitas disini adalah nilai dari *Cronbach Alpha* pada tabel *Reliability Statistic*. Berikut hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan:

Tabel 4.4.
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Pengendalian Internal(X ₁),	0,847	<i>Reliable</i>
2.	<i>Good Government Governance</i> (X ₂)	0,870	<i>Reliable</i>
3.	Tindak Pencegahan Kecurangan (Y)	0,748	<i>Reliable</i>

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan data yang ada di tabel 4.4. untuk uji reliabilitas dapat dilihat bahwa semua variabel yang diuji mempunyai nilai *Cronbach's*

Alpha lebih dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pada penelitian ini *reliable*.

4. Uji Asumsi Klasik.

Sebelum melakukan uji hipotesis syarat yang harus dipenuhi adalah lulus dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik disini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas.

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual telah terdistribusi secara normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas dapat dilihat dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Apabila nilai *Sig.* > 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai *Sig.* < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan perhitungan melalui SPSS didapatkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Hasil Uji Normalitas

Jumlah sampel	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Kesimpulan
62	0,363	Residual Berdistribusi Normal

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.5. nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang diperoleh dari uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan jumlah sampel sebesar 62 diperoleh nilai sebesar 0,363, dimana jumlah

tersebut lebih besar dari 0,05. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal, sehingga data dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Uji Multikolinieritas.

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi pada setiap variabel bebas pada model regresi linier berganda. Untuk melihat terdapat multikolinieritas atau tidak dapat dilihat nilai VIF pada tabel *Coefficients*. Apabila nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinieritas atau terdapat korelasi yang tidak dapat ditolerir. Sebaliknya apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinieritas atau korelasi dapat di tolerir. Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS yang telah digunakan diperoleh nilai VIF sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Kesimpulan
Pengendalian Internal	1,994	Tidak terdapat multikolinieritas
GGG	1,994	Tidak terdapat multikolinieritas

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.6. dapat dilihat bahwa nilai VIF dari kedua variabel independen < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tidak terdapat multikolinieritas, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

c. Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya penyimpangan pada model regresi yang diuji. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas maka perlu dilakukan uji *Glajser*. Model regresi dapat dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas ketika hasil uji *Glajser* pada tabel *Coefficients* menunjukkan nilai Sig. > 0,05. Berdasarkan uji yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig.	Kesimpulan
Pengendalian Internal	1,000	Tidak terdapat heteroskedastisitas
GGG	1,000	Tidak terdapat heteroskedastisitas

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.7. dapat dilihat bahwa nilai Sig. dari kedua variabel sebesar 1,000 yang dimana lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dan dapat melanjutkan analisis selanjutnya.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk penelitian yang menggunakan data *time series*. Pada penelitian ini tidak menggunakan *time series* sehingga tidak dibutuhkan uji autokorelasi.

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal, tidak terdapat multikolinieritas serta tidak terdapat heteroskedasitisitas. Dengan demikian data telah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi guna pengujian hipotesis. Hasil dari Uji Hipotesis dapat di lihat di tabel 4.8..

Tabel 4.8
Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,499	3,953		2,909	,005
PENGENDALIAN INTERNAL	,207	,083	,291	2,500	,015
GCG	,340	,073	,542	4,665	,000
<i>Adjusted R Square</i> : 0,587					
F hitung : 44,346					
Sig. F : 0,000					

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

1. Uji Hipotesis.

Untuk menguji pengaruh variabel independen dimana sebagai X terhadap variabel dependen sebagai Y maka digunakan uji analisis regresi sederhana. Sebelumnya telah dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀ : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H₁ : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Syarat penerimaan hipotesis adalah ketika nilai Sig. > 0,05 maka H₀ diterima dan H₁ ditolak. Berlaku sebaliknya ketika nilai Sig. < 0,05

maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat dilihat pada tabel 4.8 nilai Sig. yang diperoleh untuk variabel independen pengendalian internal (X1) sebesar 0,015 dimana lebih kecil dari 0,05 hal tersebut menandakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian hipotesis H1 yang berbunyi “Pengendalian internal berpengaruh terhadap tindak pencegahan kecurangan” diterima.

Selanjutnya, untuk hipotesis kedua yaitu *good government governance* berpengaruh terhadap tindak pencegahan kecurangan. Syarat yang sama untuk hipotesis kedua yaitu ketika nilai Sig. > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berlaku sebaliknya ketika nilai Sig. < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat dilihat pada tabel 4.8 bahwa nilai Sig. pada GGG yaitu 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian hipotesis H2 yang berbunyi “*Good government governance* berpengaruh terhadap tindak pencegahan kecurangan” diterima.

2. Uji Koefisien Determinasi.

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi itu sendiri adalah antara nol dan satu. Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,587. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mencapai 58,7%. Dengan kata lain variabel independen yang digunakan dalam

model mampu menjelaskan variabel pencegahan kecurangan sebesar 58,7%. Sedangkan variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini berpengaruh sebesar 41,3%.

3. Uji T.

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Hasil dari uji T dilihat dari perbandingan antara T hitung dengan T tabel. Uji T pertama dilakukan untuk variabel independen pengendalian internal (X1). Berdasarkan nilai pada tabel 4.8 diperoleh nilai T hitung sebesar 2,500 dimana lebih besar dari T tabel sebesar 1,67022 (lampiran 3) dan memperoleh nilai Sig. sebesar 0,015 dimana lebih kecil dari 0,050. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan. Selain itu pada tabel 4.8 diperoleh nilai *beta* sebesar 0,207 bernilai positif (+). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan.

Uji T kedua dilakukan pada variabel independen *good government governance* terhadap tindak pencegahan kecurangan. Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh nilai T hitung sebesar 4,665 dimana lebih besar dari T tabel sebesar 1,67022 (Lampiran 3) dan memperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Selain itu pada tabel 4.8 diperoleh nilai *beta* sebesar 0,340 bernilai positif (+). Dengan

demikian dapat di simpulkan bahwa variabel *good government governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan.

4. Uji F.

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara *simultan* atau bersama-sama yang ditunjukkan pada tabel ANOVA pada uji regresi. Hasil uji F dilihat dari perbandingan antara F hitung dengan F tabel. Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat nilai F hitung sebesar 44,346 dimana lebih besar dari F tabel (lampiran 4) sebesar 3, 15. Selain itu nilai Sig. F sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Secara keseluruhan hasil hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Keterangan	Arah
H1	Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tindak pencegahan kecurangan	Diterima	Positif (+)
H2	<i>Good government governance</i> berpengaruh positif terhadap tindak pencegahan kecurangan	Diterima	Positif (+)

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

D. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh pengendalian internal dan *good government governance* terhadap tindak pencegahan kecurangan. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa hipotesis yang diajukan diterima dan signifikan.

1. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan.

Hipotesis pertama yang diajukan adalah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tindak pencegahan kecurangan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan yang ada di Kantor Pemerintahan Desa, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini menunjukkan arah positif dan signifikan yang mengartikan bahwa semakin baik pengendalian internal pada Kantor Pemerintahan Desa maka tindak pencegahan kecurangan pada Kantor Pemerintahan Desa tersebut telah berjalan dengan baik. Hasil signifikan pada penelitian ini menandakan bahwa pengendalian internal sangat perlu dipertimbangkan dalam tindak pencegahan kecurangan.

Sesuai dengan teori *Stewardship* dimana seorang pemangku kepentingan yang baik adalah yang selalu dapat menyampingkan kepentingan pribadi demi tercapainya kepentingan bersama dalam

suatu organisasi dan bertindak menggunakan mekanisme situasional, dimana seorang pemimpin mampu mengambil keputusan yang adil pada situasi apapun. Selain itu teori *Stewardship* merupakan teori yang menyampaikan bahwa seorang pemimpin yang amanah diperlukan untuk kemajuan suatu organisasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Sulaeman (2013) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang baik pada suatu pemerintahan maka akan dapat meminimalisir serta mencegah kecurangan. Selain itu penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tuonakotta (2013) dan COSO (1994) yang menyatakan bahwa tindak pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara mengaktifkan pengendalian internal yang baik dan tepat.

2. Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan.

Hipotesis kedua yang diajukan adalah *good government governance* berpengaruh positif terhadap tindak pencegahan kecurangan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa hipotesis kedua diterima dengan arah positif dan signifikan. Hal tersebut menandakan bahwa semakin baik penerapan *good government governance* maka penerapan tindak pencegahan kecurangan semakin meningkat. Hasil penelitian menandakan bahwa *good government governance* merupakan salah

satu hal yang penting dalam tindak pencegahan kecurangan di dalam organisasi.

Asas penyelenggaraan pemerintahan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah salah satunya ada asas kepentingan umum, dimana pemerintahan harus dapat mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Hal tersebut sesuai dengan teori *stewardship* dimana seorang pemimpin harus dapat mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, selain itu seorang pemimpin harus mempunyai sifat amanah yang dapat menyampaikan saran dan masukan dari *principal* atau masyarakat. Asas akuntabilitas juga sangat diperlukan pada suatu pemerintahan, hal tersebut dikarenakan untuk mencapai sistem tata kelola pemerintahan yang baik maka dibutuhkan laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gusnardi (2009) yang menyatakan bahwa ketika suatu perusahaan mempunyai sistem tata kelola perusahaan yang baik maka dapat mencegah serta meminimalisir kecurangan. Selain penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi (2009) penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Beawiharta (2014) yang menyatakan bahwa ketika suatu pemerintahan telah menrapkan *good government governance* yang baik dan tepat maka tindak pencegahan kecurangan akan semakin meningkat.